

Reposisi Pancasila dengan Membuka Ruang bagi Konstruksi Budaya

Benyamin Molan

ABSTRAK: Pancasila sudah disepakati sebagai Dasar Negara Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini oleh Bung Karno digali dari kekayaan nilai budaya Nusantara Indonesia. Artinya nilai-nilai yang dijadikan dasar negara ini sudah tertanam sejak lama dalam budaya bangsa Indonesia dan sudah merupakan pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Tidak heran, Pancasila menyandang banyak peran penting, mulai dari fungsinya sebagai dasar negara, jati diri bangsa, falsafah, sampai ke etika bangsa, *Weltanschauung*, yang menjiwai kehidupan orang Indonesia. Namun dewasa ini, semuanya ini dilihat sebagai jargon-jargon kosong. Ini ditengarai sebagai telah terjadi semacam penyempitan ruang bagi Pancasila. Pancasila seperti kehilangan posisi dan ruangnya. Maka perlu ada upaya untuk secara cerdas menempatkan kembali Pancasila pada posisinya dan membuka kembali ruang bagi penggalan dan eksplorasi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan manusia dan bangsa Indonesia.

KATA KUNCI: Pancasila, posisi, ruang sosial dan politik, pendidikan

ABSTRACT: *Pancasila with five principles has been known as the foundation of the Republic of Indonesia. These five principles are extracted by Bung Karno from the cultural values of the Indonesian archipelago. Those values, functioned as the foundation of this country, have been embedded for ancient times in the culture of the Indonesian nation. As a way of life for the Indonesian people, Pancasila holds many important roles, covered from its function as the foundation of the state, to Weltanschauung, national identity, philosophy, ethics of the nation, which animates the whole life of Indonesian people. But all these are heard like some empty yargons, which sound even less loud. Nowadays, Pancasila seems to be losing its position and space. We need some efforts, accordingly, in repositioning Pancasila to the right*

position, and reopening the space for excavating and exploring Pancasila values for human life and Indonesian nation.

KEY WORDS: *Pancasila, Position, Social and Political Space, Education.*

1. PENDAHULUAN

Pancasila sudah diterima secara historis sebagai dasar negara Republik Indonesia, melalui sebuah pergumulan dinamis para pendiri bangsa yang memahami dengan baik pluralitas bangsanya. Logika sederhana ilmu bangunan menyatakan bahwa sebuah fondasi yang labil tidak akan menjamin kestabilan struktur bangunan yang berdiri di atasnya. Sesederhana inilah sesungguhnya pemahaman mengenai peran besar yang diemban Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dan sentral dalam menentukan tegak dan kokohnya Negara Republik Indonesia. Dia berfungsi sebagai landasan pijak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita bersama yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan dasar negara ini telah dilakukan sesuai kesepakatan, dengan pertimbangan rasional yang sehat, diterangi oleh nilai-nilai moral dan agama, serta disaksikan oleh sejarah, sebagai basis prapolitis bagi terbangunnya sebuah negara bangsa.

Namun tingginya peran dan posisi Pancasila itu, tidak sejalan dengan sikap dan perilaku terhadapnya. Terlihat ada semacam entropi di mana nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya mendapat tempat utama di negara ini, justru semakin tersisihkan. Pancasila hanya tampil sebagai penggembira dalam gerakan dan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Ini sesungguhnya tidak hanya terjadi sekarang. Pada zaman pemerintahan orde lama pun gejala entropi ini sudah muncul, terutama mengemuka dalam perkembangan demokrasi sebagai salah satu sila Pancasila yang mendapat perhatian besar saat itu. Tentang ini Arif Budiman menulis,

Ketika pada 1949 kita memperoleh kemerdekaan, hukum sebagai *rules of the game* dari demokrasi, masih dihormati. Kabinet yang jatuh

namanya, secara ksatria mengembalikan mandatnya. Mochtar Lubis yang berkelahi dengan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani yang dituduhnya korup, masih dapat memenangkan perkaranya. Dengan segala ekses-eksesnya, demokrasi masih berjalan. Kemudian pola ini lambat laun berubah. Hukum revolusi mulai diperkenalkan. Segala sesuatu boleh dijalankan meskipun bertentangan dengan hukum yang ada, demi keselamatan revolusi. Orang dapat ditangkap karena dianggap ‘kontra revolusioner’. Sebuah organisasi dapat dibubarkan karena dianggap ‘kontra revolusioner’ atau ‘melemahkan revolusi’. Ukuran satu-satunya untuk mencap seseorang atau sebuah organisasi menjadi ‘kontrarevolusioner’ adalah bila dia tidak patuh kepada kekuasaan yang ada. Kekuasaan menjadi sumber segala nilai, kekuasaan sebagai pusat segala nilai.²

Pancasila berfungsi sebagai jargon politik yang bisa ditampilkan pada saat tertentu, dan bisa diselubungi di saat lain, sesuai kebutuhan. Hal serupa pun terjadi pada rezim Orde Baru. Rezim yang menganggap diri telah menyelamatkan Pancasila, dan memuja serta memonumenkannya sebagai sakti, bertekad menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi semangat awal yang memberi angin surga bagi berkibarnya Pancasila, ternyata juga menimbulkan entropi baru. Pancasila hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan mahligai kekuasaan rezimnya. Dan ketika rezim orde baru tumbang, Pancasila pun ikut-ikutan terpentak. Akibatnya, Pancasila pun perlahan-lahan tergeser dari panggung politik dan budaya bangsa Indonesia. Bahkan semakin lama terendus adanya upaya-upaya terselubung yang ingin menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dengan runtutan langkah berikutnya. Peran Pancasila sebagai dasar negara dengan segala rentetan perannya, kembali dipertanyakan.

Sejalan dengan itu, dipersoalkan juga masalah kesenjangan antara nilai-nilai luhur yang dikumandangkan Pancasila, dengan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang

dulunya menyatu dengan budaya bangsa Indonesia, kini mulai menampilkan tanda-tanda kesenjangan. Keramahan yang sejatinya inklusif bagi “siapa saja”, mulai menjadi eksklusif bagi “siapa dulu” dengan embel-embel kekerasan dalam berbagai bentuk. Nilai-nilai religiositas yang berperan dalam menata kehidupan bersama manusia yang inklusif, berkembang menjadi eksklusif dan tersekat. “Kekitaan” yang melintas batas, sekarang menjadi “kekamian” yang merentang batas. Keadilan yang disertai keberadaban, kini menjadi tuntutan keadilan yang ditegakkan secara kurang beradab. Negara yang merupakan ruang publik bagi perjumpaan seluruh rakyat memperjuangkan kesejahteraan bersama di atas landasan Pancasila, menjadi ajang kolonisasi dan perebutan oleh kepentingan-kepentingan privat.

Peristiwa kelam bagi Pancasila ini bukannya mengundang kesadaran untuk menyerukan penyelamatan Pancasila, melainkan justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk secara diam-diam menyisihkannya. Sementara itu, radikalisme pun terus berkembang di ruang-ruang publik. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusat pengkajian Pancasila berubah menjadi pusat gerakan yang terkesan sebagai pengamputasian. Rumusan-rumusan Pancasila kembali dipermasalahkan. Bahkan ada ormas yang dinilai cenderung meminggirkan Pancasila. Perbedaan-perbedaan budaya, agama, keyakinan, sebagai kekhasan bahkan kapital bangsa ini dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika dan dijamin oleh Pancasila, tidak lagi diberi tempat. Kampanye-kampanye pilkada dengan intrik-intrik politik identitas yang beraroma diskriminasi suku, ras, dan agama (SARA), yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa, dilancarkan secara terang-terangan tanpa ada rasa risih.

Padahal, Bung Karno sebagai tokoh pencetus Pancasila, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila, melainkan menggali-nya dari budaya bangsa Indonesia. Menggali itu tidak berarti mencabut, melainkan ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjadi landasan itu sesungguhnya sudah berakar dalam budaya Indonesia, dan karenanya fondasi kehidupan berbangsa kita mestinya kuat dan teguh. Sepertinya Bung

Karno ingin membangun kepercayaan diri bangsa ini, bahwa negara yang baru dibangun ini, sesungguhnya bukan baru seumur jagung, melainkan telah memiliki akar kuat yang tertanam selama berabad-abad.³ Dengan “menggali”, Bung Karno ingin mencari landasan, bukan pada permukaan budaya setingkat artifak dan perilaku, yang seringkali berbeda-beda, melainkan pada aspek budaya yang lebih dalam lagi, menyangkut nilai, dan asumsi, serta prinsip dan falsafah hidup termasuk di dalamnya religiositas, yang sesungguhnya tidak sungguh-sungguh berbeda satu sama lain.⁴

Sebagaimana sejarah menuturkan bahwa yang dipilih sebagai dasar negara di sini adalah landasan budaya bangsa, dan bukan landasan agama bangsa, karena walaupun landasan agama juga memiliki akar yang kuat, tetapi aspek kebersamaan dan keberterimaan budaya, dinilai lebih besar ketimbang aspek agama; hal yang juga nampak dalam gejala-gejala akhir-akhir ini bahwa sekat budaya, nyatanya lebih berkemampuan untuk dilintasi, terutama karena relasi pembauran dan pernikahan antar etnis itu lebih dimungkinkan, daripada antar agama. Hal ini tidak menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa landasan budaya itu lebih baik dari landasan agama, melainkan dalam konteks Indonesia, landasan budaya bangsa lebih tepat. Perlu dicatat bahwa sesuatu yang baik, bisa saja berpotensi masalah ketika ditempatkan di posisi yang kurang tepat. Agama yang pada dasarnya baik, misalnya, akan bermasalah ketika ditempatkan pada tempat yang kurang pas, misalnya dalam hal ini, sebagai landasan bagi sebuah negara bangsa yang plural.

Harus diakui juga bahwa agama dan religiositas yang juga merupakan bagian dari nilai budaya Indonesia, tidak dapat disingkirkan fungsi dan perannya sebagai kapital bagi kehidupan bangsa. Karenanya agama dan religiositas diberi tempat yang pas pada sila pertama sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dianut dalam budaya-budaya yang bernuansa religius. Ketuhanan di sini tidak merujuk pada aspek teologis agama (tertentu), melainkan pada aspek religiositas universal yang dikenakan pada manusia, karena manusia adalah makhluk religius. Pantas kalau Bung

Karno merumuskan sila Ketuhanan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan”. Dan bisa dimengerti juga, bahwa rumusan sila pertama Pancasila, pada versi Piagam Jakarta, kemudian dimodifikasi lagi, karena dianggap kurang konsisten dengan kesepakatan awal, untuk mendirikan negara Indonesia sebagai negara bangsa dan bukan negara agama.

Sila pertama Pancasila ini justru semakin terverifikasi oleh upaya-upaya untuk mencari basis prapolitis di dunia dewasa ini ketika sekularisasi mulai mengakui peran agama dalam memupuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam perkembangan di Indonesia, agama bahkan dipertentangkan dengan budaya. Agama yang dianggap sebagai domain Tuhan, pada gilirannya dipertentangkan dengan budaya yang dianggap sebagai domain manusia. Dengan penyekatan tersebut, tentu saja logika dikotomis akan berkesimpulan bahwa domain manusia akan, atau bahkan harus, kalah berhadapan dengan domain Tuhan. Ini juga termasuk perkembangan pemikiran yang menimbulkan entropi Pancasila. Pancasila seperti kalah pamor berhadapan dengan agama. Padahal ajaran Tuhan dalam agama hanya bisa ditangkap oleh manusia dengan seluruh kemampuan manusiawinya, termasuk budi dan dayanya. Maka menyisihkan Pancasila hanya karena berasal dari manusia sesungguhnya sama kurang bijaksananya dengan menyisihkan Tuhan dari Pancasila.

Terkesan ada sikap alergi terhadap Pancasila sebagai bagian dari sekularisme. Pada hal sekularisme sendiri sudah banyak berubah ketika dia “terjebak dalam stagnasi karena tidak memberi ruang artikulasi bagi berbagai bentuk penghayatan nilai seperti agama-agama, yang sesungguhnya mengairi keberlangsungan sebuah negara liberal”.⁵ Agama-agama pun dapat melakukan kesalahan yang serupa, ketika tidak memberi ruang kepada pemikiran-pemikiran kreatif manusia, yang menurut keyakinan kaum religius tidak dapat terjadi tanpa seizin Tuhan.

Tidak bisa dihindari bahwa nilai-nilai budaya seharusnya mengarahkan praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun

yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya, yakni bahwa nilai-nilai baru, telah dibangun di atas perubahan basis materialisme budaya, dan menjadikan negara bukan sebagai tempat orang mengejar kepentingan-kepentingan bersama, melainkan lebih sebagai sapi perah untuk memerah nilai-nilai individual dan kelompok.⁶ Budaya religiositas yang dirumuskan pada awalnya sebagai Ketuhanan yang berkebudayaan, yang dimodifikasi menjadi Ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari budaya toleransi, mengalami perubahan penafsiran dan berpotensi memunculkan sikap intoleransi dalam berbagai bidang kehidupan.

Nilai Keadilan dalam kemanusiaan, yang disandingkan dengan keberadaban, malah sering dipisahkan satu sama lain. Nilai keadilan sering diperjuangkan tanpa, atau dengan mengorbankan, nilai kemanusiaan dan keberadaban. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip etis yang menyandingkan keadilan dengan kebaikan hati.⁷ Sebaliknya juga tidak dapat diterima, ketika untuk kepentingan-kepentingan pribadi, orang lalu mengedepankan aspek keberadaban dan kemanusiaan, tanpa peduli pada aspek keadilan. Terorisme dan radikalisme seringkali dibenarkan karena memperjuangkan keadilan. Padahal sesungguhnya nilai keadilan yang diperjuangkan di sini mengabaikan nilai keberadaban.⁸

Nilai persatuan yang dibangun pun tampaknya jauh dari sikap nasionalisme, apalagi patriotisme. Sepertinya, yang lebih menjadi fokus perhatian dewasa ini adalah persatuan masing-masing kelompok, agama, sosial, politik yang mengarah ke politik identitas dan SARA, daripada ke persatuan sebagai bangsa. Harus diakui juga bahwa nasionalisme dan patriotisme itu dapat ditumbuhkan, ketika rakyat benar-benar mendapat perhatian dari negara. Rakyat yang mendapat perhatian dari negaranya akan dengan gagah berani membela negaranya. Sementara rakyat yang tidak mendapat perhatian dari negaranya, akan enggan membela negaranya, seberapa pun terampil dan terlatihnya dia.

Nilai demokrasi, lebih dipahami sebagai memperjuangkan nilai dan kepentingan masing-masing kelompok, ketimbang nilai dan kepentingan

bersama sebagai bangsa. Politik tidak lagi dilakukan dalam kebersamaan (*in concerto*) sebagai tingkat perilaku manusia paling tinggi yakni pada level tindakan (*action*), melainkan diturunkan levelnya hanya sekadar sebagai kerja (*labor*) atau karya (*work*), demi memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok.⁹ Akibatnya negara hanya menjadi tempat orang mengejar kepentingan individual, dan kelompok daripada kepentingan bersama. Ruang publik tidak lagi menjadi wilayah keleluasaan untuk bertindak dalam kebersamaan dan bertransaksi argumentasi, melainkan menjadi wilayah yang dikolonisasi untuk kepentingan kelompok.

Bercermin pada keadilan sosial, ada kesan selama ini kurang adanya perhatian pada masalah menyangkut besarnya kesenjangan antara kelas kaya dan miskin. Kesenjangan seperti dibiarkan saja, karena bagi orang kecil, kesenjangan ini sering dianggap sebagai kenyataan yang diterima begitu saja, sebagai surat nasib yang tidak perlu dipersoalkan. Yang sering lebih dipersoalkan adalah ketidak-adilan. Ketika orang merasa diperlakukan secara tidak adil, misalnya, di saat haknya diambil orang, terkesan ada penolakan, sekurang-kurangnya dalam hati. Namun ketika berhadapan dengan soal pemerataan, hampir tidak ada yang memperlmasalahkan.¹⁰ Orang Indonesia itu sudah menerima bahwa memang seharusnya ada orang kaya dan ada orang miskin. Bahkan kesenjangan itu diterima sebagai takdir. Bisa dimengerti, kalau pemerataan sering kurang menjadi tuntutan. Bahkan penafsiran terhadap sila kelima ini seringkali dilakukan tanpa cukup memperlihatkan perbedaan yang berarti dari sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Berbicara tentang keadilan sosial tak bisa lepas dari pembicaraan tentang pemerataan, berhadapan dengan struktur masyarakat yang berpotensi membuat orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin. Kalau struktur ini dibiarkan berjalan, maka pemerataan tidak akan terjadi, bahkan makin lama kesenjangan akan makin lebar. Ibarat perlombaan antara pengendara mobil dan pejalan kaki. Jarak antara pengendara mobil dan pejalan kaki akan semakin panjang seiring dengan

berjalannya waktu perlombaan. Maka perlu ada upaya pembongkaran struktur ini, agar orang yang bernasib buruk, karena dilahirkan dari keluarga miskin misalnya, mampu memperbaiki nasibnya. Perlu dilakukan berbagai upaya berupa diskriminasi positif dalam bentuk tindakan afirmasi (*affirmative action*) untuk membongkar struktur dan menyelamatkan mereka yang terpinggirkan karena nasib buruk ini. Dan baru pada akhir-akhir ini, program seperti kartu sehat dan kartu pintar mempertandakan adanya perhatian serius pemerintah pada masalah keadilan sosial.

2. KEGAGALAN DISKURSUS DALAM UPAYA MENGUKUHKAN POSISI PANCASILA

Sejak ditawarkan hingga disepakati sebagai dasar negara, Pancasila terus mengalami rangkaian diskursus. Diskursus ini adalah bagian dari upaya, tidak hanya untuk memantapkan Pancasila pada posisinya sebagai dasar negara, melainkan juga untuk mengaplikasikannya dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diskursus pertama menyangkut Pancasila adalah usulan penetapannya sebagai dasar negara. Bung Karno, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, menawarkan konsep Pancasila pada sidang BPUPKI, yang saat itu sedang berupaya mencari sebuah landasan yang tepat bagi negara baru Indonesia, yang kemerdekaannya akan segera diproklamirkan; sebuah falsafah dasar (*philosophische Grondslag*). Para pendiri bangsa selanjutnya bermusyawarah untuk menyepakati landasan bagi negara baru ini. Kesepakatan akhirnya tercapai melalui diskusi dan perdebatan yang alot, bahwa negara baru Indonesia ini akan dibangun sebagai negara bangsa. Negara ini tidak berlandaskan agama, tetapi tidak menafikan peran agama; bukan negara agama tetapi negara beragama. Artinya Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Tidak ada integrasi, tetapi juga tidak ada separasi, antara keduanya. Yang ada adalah diferensiasi. Ada perbedaan antara agama dan negara dalam ruang masing-masing dengan tetap menjalin hubungan dan saling menjaga independensi sekaligus saling melindungi. Negara menjamin kebebasan be-

ragama. Agama dijadikan benih kebajikan yang mengadabkan politik.¹¹

Sejalan dengan perannya sebagai dasar dan falsafah negara, Pancasila dianggap sebagai kontrak sosial dan *Weltanschauung* (pandangan dunia). Dan *Weltanschauung* itu digali dari bumi kebudayaan Nusantara Indonesia.¹² Ini ditegaskan kembali, terutama ketika berhadapan dengan pandangan lain yang mewacanakan Pancasila hanya sebagai kompromi politik saja, semacam konsensus nasional dari berbagai pandangan dan aliran politik, yang dapat “ditinjau kembali”; itu merupakan kata lain dari “diubah” atau bahkan “diganti”.

Pengaruh pandangan kompromi politik ini sepertinya membuat Pancasila tidak banyak dibicarakan lagi sampai muncul buku *Lahirnya Pantjasila* pada tahun 1947, dengan pengantar dr. Radjiman Widyodiningrat, mantan ketua BPUPKI. Sayangnya buku itu tenggelam dalam riuh rendahnya perjuangan menghadapi agresi Belanda serta perdebatan soal bentuk negara, federal atau republik.¹³

Diskursus Pancasila muncul lagi pada tahun 1950-an, dengan pelopornya Muhammad Yamin, yang mendukung Pancasila tidak hanya sebagai *Weltanschauung*, melainkan juga sebagai jati diri dan kepribadian serta ideologi bangsa. Pancasila kemudian menjadi ideologi tunggal negara dan menyingkirkan ideologi yang lain. Ini ditandai dengan dicetuskannya Manifesto politik dengan Usdek sebagai tafsiran tunggal Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dengan munculnya Manipol Usdek dan Nasakom, perlahan-lahan Pancasila bergerak ke kutub kiri. Seiring dengan gerakan ini, gerakan anti komunis pun mulai menggeliat, dan memuncak pada tampilnya Orde Baru yang menumpas Gerakan Tigapuluh September yang kontroversial. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto melabelkan Partai Komunis sebagai musuh Pancasila. Gerakan 30 September dinyatakan sebagai gerakan yang ingin mendongkel ideologi Pancasila dan menggantinya dengan ideologi komunisme. Pancasila berhasil dipertahankan, dan dimonumenkan sebagai sakti.

Tumbangnya rezim Orde Lama dengan konsep Nasakomnya (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang kekirian, dianggap sebagai saatnya memurnikan dan menegakkan kembali Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru menyerukan pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini adalah zaman kebangkitan Pancasila. Pada masa ini diskursus yang berjalan, tidak hanya menyangkut pengukuhan peran dan kedudukan Pancasila, melainkan juga pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirlah Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Lepas dari kelemahannya, yang sejalan dengan upaya pemanipulasian Pancasila sebagai alat kekuasaan, harus diakui bahwa Program P4 ini adalah salah satu upaya pengamalan Pancasila yang terstruktur rapi dan terukur. Sebagaimana telah terjadi, perlahan-lahan tapi pasti, program pengamalan ini beralih menjadi indoktrinasi. Pancasila menjadi satu dengan kekuasaan, dan berkembang menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Maka tidak mengherankan, tumbangnya Orde Baru seolah-olah secara serta merta menyeret Pancasila, untuk ikut pula terhempas. Ini menjadi kesempatan baik bagi mereka yang ingin mendongkel Pancasila, memulai lagi gerakannya. Bahkan gerakan itu mendapat momentumnya ketika negara dengan sadar dan sengaja mencabut Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pembinaan Pancasila (P4). Bahkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan (Indonesia 2020), Pancasila sama sekali tidak disebut sebagai cita-cita luhur bangsa ke depan.

Sejalan dengan itu mulai bermunculan sikap-sikap intoleran dan perilaku radikal. Penghapusan tujuh kata dalam rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta, yang tadinya dianggap sebagai *gentlemen agreement* yang merayakan keberagaman, dianggap sebagai kecolongan.

Gerakan untuk mengutak atik Pancasila sepertinya terus berlanjut dan mencuat pada Pilkada DKI sebagai momentum terungkapnya gerakan-gerakan radikal yang dibangun secara diam-diam, untuk terus

mengganggu eksistensi Pancasila. Gerakan-gerakan ini hendaknya dilihat juga sebagai tantangan-tantangan untuk terus menerus membedah Pancasila dan menemukan pendaran-pendaran nilai yang justru akan semakin memperlihatkan kekuatan posisi Pancasila.

3. POTENSI BUDAYA PANCASILA SEBAGAI BASIS PRAPOLITIS

Arena politik dunia sempat dihangatkan dengan wacana menyangkut basis prapolitis bagi negara-negara liberal. Diskursus ini telah melibatkan para filsuf dan teolog. Filsuf kondang Jürgen Habermas muncul dengan pertanyaan: “Apakah satu negara liberal dan sekular hidup dari syarat-syarat normatif, yang tidak dapat dijaminnya sendiri?”. Pertanyaan ini diajukan dalam tulisannya berjudul “Basis Prapolitis sebuah Negara Hukum Demokratis?” yang disampaikannya pada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh “Katholische Akademie” Bayern di München tanggal 19 Januari 2004.¹⁴ Pertanyaan tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang dikemukakannya dalam pidato ucapan terima kasihnya saat menerima hadiah perdamaian dari Ikatan Toko Buku Jerman. Dalam pidatonya itu Habermas, mengajak masyarakat sekuler untuk memahami secara baru keyakinan-keyakinan religius, yang bukan hanya merupakan “peninggalan-peninggalan masa silam, melainkan merupakan satu tantangan kognitif bagi filsafat.”¹⁵ Menurut dia setiap agama pada hakikatnya adalah “pandangan hidup” atau “*comprehensive doctrine*”, dalam arti bahwa agama tersebut menuntut hak untuk menstrukturasi satu gaya hidup secara menyeluruh. Tetapi agama tidak bisa memonopoli interpretasi dan melakukan penataan hidup yang menyeluruh dalam sekularisasi pengetahuan, netralisasi kekuasaan negara dan kebebasan beragama yang diperluas. Ini bisa dipahami mengingat doktrin komprehensif itu tidak tunggal, bahkan menurut Amartya Sen, setiap orang menganut lebih dari satu doktrin komprehensif. Ini membuat setiap orang sesungguhnya tidak benar-benar tersekat satu sama lain, melainkan selalu akan bersinggungan

dengan yang lain dalam berbagai doktrin komprehensif yang dianutnya.

Memperhatikan perkembangan ini, bisa dikatakan bahwa apa yang sekarang dipersoalkan menyangkut basis prapolitis untuk sebuah negara liberal yang tidak bisa terwujud dengan mengabaikan agama, ternyata sudah terantisipasi dengan baik oleh Pancasila. Kesadaran akan ketaktunggalan doktrin komprehensif juga sudah disadari oleh para pendiri bangsa kita. Karena itu sila-sila dalam Pancasila pun dirumuskan dengan bahasa yang sangat publik. Sila pertama sekalipun, yang bersinggungan langsung dengan perhatian pada agama, tidak dirumuskan dengan bahasa teologis agama tertentu, melainkan dengan bahasa yang tetap sangat publik: Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini justru digunakan untuk menggantikan rumusan Sila Pertama Piagam Jakarta yang terkesan kurang mencerminkan ke-tak tunggalan doktrin komprehensif tadi.

Ternyata Pancasila merupakan landasan negara Indonesia yang tetap aktual mengikuti perkembangan dan menjawab tantangan zaman. Warga negara yang berakal sehat, berniat baik, jujur, dan berkeinginan membangun Indonesia menjadi negara sejahtera bagi seluruh rakyatnya yang beraneka ragam, pasti akan mendukung Pancasila. Pendaran-pendaran nilai yang belum terpaparkan ini perlu digali lagi dan dimunculkan, sebagai kapital untuk membangun dan memperkokoh keutuhan dan memajukan negara republik Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang digali dan ditemukan oleh Bung Karno sesungguhnya baru sebagian yang dimunculkan. Masih ada pendaman nilai seperti gunung es, yang memerlukan kreativitas untuk menggali. Maka Pancasila perlu diberi ruang oleh bangsa ini agar kandungan kekayaan nilai di dalamnya dapat dieksplorasi dan diangkat ke permukaan. Karena itu cara penggalian seperti yang dilakukan dalam program P4 yang pernah menjadi primadonya Orde Baru rasanya kurang tepat. Dibutuhkan cara-cara baru yang lebih kreatif dan terbuka agar Pancasila benar-benar bisa berfungsi sebagai *Weltanschauung*, etika, falsafah, prinsip hidup dalam berbangsa dan bernegara.

4. MEREPOSISI PANCASILA DENGAN MEMBUKA RUANG KONSTRUKSI BUDAYA

Untuk menggali kekayaan nilai Pancasila itu lebih jauh, maka Pancasila perlu diberi ruang seluas-luasnya dan tidak dibatasi dengan indoktrinasi yang mengungkung kreativitas manusia Indonesia, untuk menggali dan menemukan lebih banyak lagi kekayaan nilai-nilai yang bisa memberikan sumbangan yang lebih besar lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mengalami bahwa selama ini, pembicaraan mengenai Pancasila masih sangat terbatas. Bahkan ada upaya-upaya untuk mempersempit ruang gerak Pancasila yang berpotensi mengerdilkan dan membonsai Pancasila sekadar menjadi ornamen yang indah, manis, romatis dan nostalgik.

Pendidikan yang seharusnya membuka lebih banyak ruang bagi penggalian dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kurang dimampukan secara optimal. Sekolah-sekolah, terutama sekolah public yang seharusnya menjadi tempat bagi semua warga pemelajar untuk belajar berinteraksi sebagai bangsa sering dikembangkan sebagai ruang privat yang cenderung eksklusif bagi kelompok tertentu. Bahkan seperti sudah disinyalir, ada kampus perguruan tinggi negeri yang terkesan telah diprivatisasi menjadi tempat bertumbuhnya radikalisme. Pancasila yang seharusnya menjadi tuan rumah terutama di ruang publik, telah dikesampingkan menjadi hanya sekadar ornamen pajangan di sana. Acara-acara kebangsaan sebagai acara-acara publik pun seperti telah dikapling menjadi acara-acara privat.

Muncul anggapan bahwa agama dan moralitas privat bisa berfungsi sebagai *panacea* untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Inilah yang terjadi, ketika tawuran antar pelajar semarak, penanggulangan yang ditawarkan adalah menambah pelajaran agama. Mungkin betul juga bahwa siswa yang menjalani kehidupan beragamanya dengan benar tidak akan tawuran. Tetapi pertanyaan yang muncul adalah apakah penambahan pelajaran agama akan memperbaiki perilakunya dan serta merta mengurangi tawuran? Mungkin yang perlu ditambahkan seharusnya bukan hanya pelajaran agama, melainkan juga pelajaran Pancasila. Mengajarkan

anak mengantri, misalnya, bukan hanya merupakan ranahnya pelajaran agama melainkan juga pelajaran etiket, tata krama, dan sikap menghargai kesetaraan dengan orang lain.

Politik juga hendaknya melakukan hal yang sama, membuka ruang bagi penggalan nilai-nilai Pancasila. Ada kecenderungan bahwa politik sebagai kegiatan publik di ranah publik (Arendt) berubah menjadi kegiatan privat di ruang publik. Banyak ruang publik telah dikolonisasi menjadi ruang privat. Perubahan basis material yang mengutamakan kepentingan ekonomis individual, membuat negara yang merupakan ranah publik, diperebutkan untuk dimanipulasi dan dijadikan sapi perah bagi kepentingan privat.

Pemberian ruang itu tidak hanya untuk penggalan tetapi juga untuk upaya pengamalannya. Metode pengamalan cenderung terlalu menyerempet ke konsep esensialis, ketimbang konsep konstruksionis budaya.¹⁶ Konsep P4 di masa Orde Baru adalah contoh dari program pengamalan yang sangat beraroma esensialis. Pada konsep esensialis, budaya selalu dilihat sebagai nilai-nilai-jadi, yang siap dihadirkan ke publik untuk dihayati dan dijalani. Nilai-nilai yang sudah ada itu siap untuk dibudayakan. Itu yang pernah terjadi juga pada Pancasila. Pengamalan Pancasila selalu bertolak dari nilai, sehingga terkesan berpola platonis, yang berangkat dari dunia ide-ide ke pengalaman inderawi.

Pada prinsip konstruksionis, ruang publik harus menjadi ruang bagi semua yang berkepentingan untuk belajar. Siswa belajar dari guru dan sesama siswa, para guru pun belajar dari siswa dan sesama guru dan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian ruang pendidikan menjadi ruang *aha*, tempat pelaku dan peserta didik menemukan nilai-nilai yang menyentuh dirinya. Di sini, nilai-nilai budaya itu dibentuk dan diinternalisasi melalui praktik-praktik budaya. Pendekatan berdasarkan nilai-nilai ideal ke penerapannya dalam perilaku budaya, sudah mengalami masalah ketika perubahan zaman membuat orang tidak lagi hanya mengacu pada nilai-nilai budayanya sendiri, melainkan juga pada budaya-budaya lain yang ditemuinya melalui berbagai sumber lain. Maka pengembangan

dan penanaman nilai seyogianya dimulai dari basis material budaya. Basis material itulah yang kemudian mengarah ke nilai-nilai.

Tentu saja metode ini tidak selalu mengarah ke hal-hal yang positif. Sebagai alat, metode itu bisa dipakai juga ke arah yang negatif. Radikalisme seperti halnya mengandalkan konsep konstruksionisme, bahkan sudah sampai pada tahap materialisasi spiritual. Janji-janji muluk tentang hidup sejahtera dilingkupi bidadari yang diumumkan kepada para teroris pemberani, atau ancaman pembakaran di neraka yang ditiupkan kepada para pecundang, adalah konsep-konsep fungsionalisasi budaya dan materialisasi spiritual yang benar-benar efektif dan menarik untuk mematok nilai-nilai dalam diri seseorang. Sayang bahwa metode yang efektif ini justru dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif.

Praktik penggalan nilai Pancasila juga sering lebih condong ke institusionalisasi nilai ketimbang pada nilainya sendiri. Ivan Illich dalam bukunya *Deschooling Society* mengkritik dengan tajam institusionalisasi nilai yang dilakukan dalam berbagai macam nilai. Nilai kecerdasan, misalnya, cenderung diinstitusionalisasikan dalam sekolah, seolah-olah nilai kecerdasan hanya bisa didapatkan melalui sekolah. Ketika kita menjejar nilai kecerdasan, kesimpulan yang ditarik adalah membangun sekolah. Tidak berarti bahwa kita sudah harus meninggalkan sekolah, melainkan bahwa konsentrasi kita tidak harus berlebih pada sekolahnya, melainkan pada pendidikan yang mencerdaskan. Pendidikan harus membuka ruang bagi wawasan dan orientasi yang mencerdaskan, dan bukannya mengerdilkan dan membuat orang hanya melihat ke satu arah saja.

Selain itu, nilai lain seperti keselamatan pun cenderung dilembagakan dalam agama. Agama menjadi satu-satunya jalan untuk keselamatan manusia, seolah-olah orang yang giat dalam kehidupan beragama, pasti adalah seorang warga negara yang baik. Apa yang kita hadapi tidak demikian. Banyak koruptor sebenarnya termasuk orang-orang yang giat menjalankan agama. Ini menampakkan bahwa apa yang terjadi pada moralitas privat tidak serta merta berlaku juga pada moralitas publik.

Moralitas publik pun tidak bisa diajarkan dengan menggunakan Kitab Suci dan ajaran-ajaran teologi, melainkan dengan membiasakan kesantunan dan keberadaban sebagai manusia dengan berbagai orang beragama. Mengajarkan kesantunan dalam ruang privat bisa dipahami sebagai terbatas pada relasi privat dan hanya bisa diajarkan para guru privat. Sedangkan kesantunan dalam ruang publik dapat diajarkan oleh siapa saja sebagai manusia, dengan patokannya adalah moralitas publik. Maka agama dan Pancasila tidak bisa saling menggantikan melainkan saling melengkapi.

Walaupun sama-sama ingin meluruskan tindak laku manusia, Agama tidak dapat menggantikan Pancasila. Agama bergerak dari moralitas privat sedangkan Pancasila bergerak dari moralitas publik. Orang dengan mudah sekali sampai berkesimpulan bahwa ketika moralitas privat seseorang itu baik, maka kebaikan dalam bidang moralitas privat itu akan berimbas juga pada moralitas publiknya. Seorang yang taat beragama akan serta merta menjadi warga negara yang baik, maka tidak pantas untuk dihukum. Sementara seseorang yang tidak menjalankan praktik-praktik agamanya, pasti bukan warga negara yang baik dan harus dihukum. Fakta yang terlihat di negeri ini bahwa banyak koruptor adalah orang-orang yang cukup aktif dalam kegiatan keagamaan. Karenanya kegiatan beragama perlu dilengkapi dengan pengembangan sikap etis (bukan sekadar etiket).

5. SISTEM PENDIDIKAN PANCASILA: WACANA PENUTUP

Kita sudah mengenal adanya Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila. Mungkin sudah saatnya untuk dipikirkan serius mengenai sistem pendidikan yang berlatar belakang konteks Indonesia; semacam Sistem Pendidikan Pancasila. Hingga sekarang, Pancasila hanya merupakan bagian dari pendidikan bangsa ini, sehingga malah sempat terdepak dari dunia pendidikan sebagai akibat dari kedekatannya dengan kekuasaan Orde Baru. Padahal Pancasila berperan besar dalam menjamin keutuhan dalam berkehidupan berbangsa di negara ini. Kalau Pancasila adalah dasar

negara, dan nilai-nilainya digali dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara Indonesia, dan berperan sebagai *Weltanschauung*, *philosophische Grondslag*, *staatfundamental norm*, etika, berarti Pancasila sesungguhnya mencitrakan satu model manusia Indonesia ideal, yang berketuhanan, beradab dan berkeadilan, demokratis dan dinamis, toleran dan harmonis, solider dan sejahtera bersama.

Maka Indonesia membutuhkan satu sistem pendidikan yang bisa membuka peluang bagi perkembangan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai dasarnya tentu saja pendidikan agama sebagai doktrin komprehensif yang merupakan representasi domain privat, perlu mendapat perhatian. Tetapi pendidikan agama perlu juga dilengkapi dengan pendidikan lain, terutama yang juga berkaitan dengan moralitas publik. Dalam hal ini Etika yang merupakan refleksi kritis atas tindakan, dan Logika yang merupakan refleksi kritis atas penalaran, perlu dikembangkan dalam menghadapi wilayah publik. Karenanya, keduanya bisa menjadi representasi yang melintasi wilayah publik.¹⁷ Pendidikan etika bisa diawali dengan pendidikan etiket pada tingkat dasar, yang bisa menjadi landasan konstruksionis untuk menuju pendidikan etika. Dalam hal ini, metode Bung Karno dengan menggali nilai-nilai Pancasila itu sangat efektif, karena pada ujungnya ditemukan nilai (konstruksionis), bukan sebaliknya menemukan nilai-nilainya terdahulu, baru kemudian mengaktualisasikannya (essensialis). Itu berarti etiket harus dilanjutkan ke etika. Pendidikan etiket yang tidak berlanjut ke pendidikan etika, akan melahirkan tipe manusia munafik, yang hanya mengutamakan bentuknya tanpa peduli pada isi. Banyak orang tidak memahami dengan baik apa itu etika sesungguhnya, dan menyamakannya begitu saja dengan etiket. Etika yang dimaksudkan di sini adalah refleksi kritis atas tindakan manusia, baik atau buruk; suatu bentuk filsafat moral, yang justru juga akan menilai tindakan-tindakan dan perilaku manusia termasuk perilaku yang berkaitan dengan agama.

Menyangkut pendidikan etika dan logika, pengalaman menarik dari Thomas Lickona bisa menjadi ilustrasi. Ketika Lickona berbicara tentang

moralitas kepada orang tua siswa, dia selalu menggunakan Alkitab. Suatu saat seorang tua siswa bertanya kepadanya: “Kalau Anda tidak membawa-bawa Alkitab dalam menjelaskan moralitas, lalu dasar apa yang Anda gunakan untuk membedakan yang baik dan buruk?” Pertanyaan ini sesungguhnya senada dengan pertanyaan yang diajukan oleh Sokrates dalam dialognya dengan Euthypro sebagaimana dilaporkan oleh Plato yakni: Apakah suatu perbuatan baik itu memang baik *karena* diperintahkan oleh dewa atau *maka* diperintahkan oleh dewa. Atau sebaliknya, suatu perbuatan itu buruk *karena* dilarang oleh para dewa, atau *maka* dilarang oleh para dewa. Dialog itu menunjukkan bahwa nilai kebaikan/keburukan itu bersifat universal, lepas dari diperintahkan atau dilarang oleh para dewa.¹⁸ Karena itu nilai-nilai itu harus ditampilkan tidak hanya oleh agama melainkan juga etika, yang dibantu dengan logika sebagai metode atau alat (*organon*). Pendidikan etika adalah pendidikan untuk bertindak-baik, secara bertanggung jawab, dan logika adalah pendidikan untuk bernalar secara baik dan bertanggung jawab. Setiap orang entah beragama atau tidak beragama, dapat terbantu dengan etika dan logika dalam menemukan dan mengejar nilai-nilai ini.

Sementara itu pendidikan Seni (rupa, gerak, suara, lukis, pahat, bahasa, dan lain-lain), Matematika, Ilmu-ilmu sosial, dan Fisika bisa dikembangkan sebagai ilmu-ilmu yang memungkinkan orang untuk leluasa mengembangkan dirinya sebagai manusia. Seni itu berperan dalam mengolah rasa; Matematika diperlukan untuk membuat orang menjadi cerdas dalam melakukan perhitungan-perhitungan supaya bisa mengambil sikap dan keputusan yang tepat; Ilmu sosial berfungsi untuk mengenal dan bersosialisasi dengan sesama dan lingkungan sekitar; Fisika berfungsi untuk mengenali alam dan membuat orang cerdas bergaul dengan alam. Bagaimana wujud sesungguhnya sistem pendidikan ini, mulai dari konsepnya sampai pada tingkat operasionalnya, masih perlu dikembangkan melalui wacana dan pengkajian yang lebih jauh lagi, baik secara intensif maupun ekstensif.

Dengan sistem pendidikan model ini, Pancasila bisa mendapat tempat yang lebih sentral dan leluasa untuk menjadi pedoman bagi perkembangan

manusia Indonesia seutuhnya; manusia Indonesia yang lebih terbuka, berwawasan luas dan berakal sehat. Dalam sistem ini semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) itu belajar. Pendidikan hendaknya menjadi wilayah pembelajaran untuk semua pihak yang berkepentingan.

CATATAN AKHIR

¹ “Yang dimaksud sebagai entropi adalah situasi patologis, ketika sebagai nilai, Pancasila hanya menjadi simbol yang tak dipahami maknanya...” Lih. Yudi Latif, “Pancasila dan Kebudayaan”, Kata Pengantar dalam Syaiful Arif. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosial*. Jakarta: Gramedia, hlm xxiii.

² Assayaukanie Stanley, Luthfi. 2006. Arief Budiman: Kebebasan, Negara, Pembangunan. Jakarta: Pustakan Alvabet dan Freedom Institute, hal. 95

³ Clifford Geertz menyebutnya New States of Old Societies.

⁴ Andre Ata Ujan et al. 2009. Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: Indeks hal. 32, berbicara tentang Lapisan Kebudayaan menurut Edgar Schein.

⁵ *Ibid*, hlm.ix.

⁶ Elaborasi mengenai konsep Ignas Kleden tentang perubahan basis material dapat dibaca dalam Syaiful Arif. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosial*. Jakarta: Gramedia.

⁷ Frans Magnis-Suseno. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta: Kanisius, 130-132. Di sini Magnis mengemukakan tiga prinsip moral dasar yakni prinsip sikap baik, keadilan, dan hormat pada diri sendiri.

⁸ Mantan Presiden Suharto, pernah dituntut untuk diadili, tetapi para pendukungnya mengusulkan untuk memberi pengampunan karena jasanya bagi rakyat Indonesia selama 32 tahun menjadi presiden Republik Indonesia. Namun Gus Dur meminta agar Suharto tetap diadili, dan kalau memang bersalah boleh diampuni. Prinsip keberadaban harus dijalankan bersama dengan prinsip keadilan. Pengampunan hanya bisa dilakukan pada orang yang benar bersalah.

⁹ Perbuatan manusia terdiri dari *labor*, *work*, dan *action*. *Action* adalah perbuatan manusia paling tinggi yang hanya bisa dilakukan dalam kebersamaan (*in concerto*). Uraian tentang ini dapat dibaca juga dalam Benyamin Molan, “Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Risiko”, *Respons*, 14, No. 01, hlm 59-64.

¹⁰ Prof Mubyarto dari Universitas Gajah Mada pernah mengatakan bahwa bagi bangsa kita, “keadilan lebih penting daripada pemerataan kemakmuran” (Kompas,

4 Juni 1982). ... Bukankah bangsa Indonesia, khususnya Jawa sudah bisa menerima kenyataan adanya kaum priyayi (yang biasanya mewah paling sedikit pada zaman dulu) dan wong cilik (yang hidupnya pas-pasan). Orang gampang merasa tidak adil kalau dicurangi. Tetapi mengapa orang yang kekurangan makanan tidak merasa tidak adil ketika tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya, hidup bermewah-mewah? (Arif Budiman. 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Freedom Institute dan Pustaka Alvabet, hlm 30.)

¹¹ Syaiful Arif. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosial*. Jakarta: Gramedia, hlm 27.

¹² *Ibid*, hlm 33.

¹³ *Ibid*, hlm 34.

¹⁴ Budi Kleden, Paul dan Sunarko Adrianus. 2010. *Dialektika Sekularisasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera & Ledalero, hlm. v

¹⁵ *Ibid*. hlm. viii.

¹⁶ Lihat Andre Ata Ujan et al. 2009. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks, hlm 17-19.

¹⁷ Ini adalah model minimalis dari artes liberales (*liberal arts*), yang dikenal dalam pendidikan klasik. Mungkin Agama, Etika, dan Logika, bisa dianggap sebagai triviumnya, sedangkan Seni, Matematika, Ilmu-ilmu Sosial, dan Fisika, sebagai quadriviumnya.

¹⁸ Lihat Benyamin Molan. 2015. *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks, hal. 80-83.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. 1970. *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Arif, Syaiful. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Assayaukanie, Stanley, Luthfi (editor). 2006. *Arief Budiman: Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Pustakan Alvabet dan Freedom Institute.
- Blackburn, Simon. 2001. *Being Good: A Short Introduction to Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Budi Kleden, Paul & Sunarko, Agustinus. 2010. *Dialektika Sekularisasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera & Ledalero.
- Davies, Brian. 1993. *An Introduction to the Philosophy of Religion*. New York: Oxford University Press.
- Illich, Ivan. 1974. *Deschooling Society*. London: Calders & Boyars.

- Kleden, Ignas. 2001. *Indonesia sebagai Utopia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Magnis Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Molan, Benyamin. 2015. *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks.
- Rachels, James. 1995. *The Elements of Moral Philosophy*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Sihotang, Kasdin et al. 2014. *Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Thiroux, Jacques. 1995. *Ethics: Theory and Practice*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.